

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa orang, begitu mendengar istilah "perpustakaan", akan langsung membayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan buku tanpa urutan tertentu, sementara yang lain akan membayangkan baris demi baris rak buku atau lemari yang berisi judul yang sama. Benar, perpustakaan telah ada sejak jaman dahulu, tetapi evolusinya yang lamban berarti bahwa ia hanya membuat sedikit kemajuan selama berabad-abad. Namun kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa semakin pesat seiring dengan era globalisasi. Rasa haus masyarakat akan pengetahuan tumbuh seiring dengan laju perkembangan teknologi. Terlepas dari kenyataan bahwa "informasi yang tepat" digambarkan sebagai mendapatkan informasi yang sesuai dengan standar dan permintaan, orang sering kali kewalahan oleh banyaknya informasi yang mereka temukan selama pencarian dan mengalami kesulitan dalam memutuskan potongan data mana yang akan digunakan. Masyarakat sebagai konsumen informasi dibuat "ragu-ragu" oleh banjir tanggapan atas permintaan informasi mereka dari berbagai sumber, membutuhkan informasi yang pasti tentang kebenaran sumber-sumber tersebut. Perpustakaan sebagai sumber informasi sangat penting untuk mencari informasi yang dibutuhkan, perpustakaan adalah pusat informasi yang menghimpun, mengemas, mengolah, kemudian selanjutnya mendistribusikan bahan pustaka dengan digunakan seoptimal mungkin untuk pemakainya.

Perpustakaan merupakan sebuah wadah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat guna melengkapi kebutuhan akan informasi untuk mereka sendiri, tanpa pandang status sosial, tingkat pendidikan, agama, politik, jenis kelamin dan usia. Mengacu Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan, perpustakaan merupakan lembaga yang profesional dalam mengelola kumpulan karya cetak, karya tulis, ataupun karya rekam dalam sebuah sistem yang terstandarisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna akan pelestaria, penelitian, pendidikan, rekreasi, dan informasi. Demikian pula interpretasi berdasarkan Undang-Undang Perpustakaan dalam bab 1 pasal 1 mengungkapkan yaitu perpustakaan ialah suatu lembaga yang menghimpun pengetahuan yang dicetak dan direkam, serta mengelolanya secara khusus untuk memenuhi kebutuhan intelektualitas masyarakat melalui berbagai jenis interaksi pengetahuan.

Peran perpustakaan adalah mencari/ menelusuri, mengembangkan, membina dan juga menyalurkan kegemaran dalam minat dan bakatnya dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh perpustakaan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sutarno (2006) bahwa berbagai kegiatan tersebut diantaranya dilaksanakan melalui pencarian potensi, minat, kemampuan yang dilaksanakan melalui pengadaan beragam lomba misalnya membaca puisi, melukis, mengarang, kuis, dan sebagainya supaya para peserta bisa menampilkan potensinya, menerapkan, dan melakukan pengembangan kreativitas secara betul. Tujuan kegiatan tersebut dapat dijadikan pedoman untuk kehidupan masa depan.

Salah satu kategori perpustakaan yang dapat menjangkau semua status sosial adalah perpustakaan kota atau biasa disebut perpustakaan umum. Mussuryani (2019) mengungkapkan bahwa perpustakaan umum diibaratkan sebagai universitas rakyat atau universitas komunitas, hal ini dikarenakan kedudukan perpustakaan umum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karena fungsinya melayani seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh dan memperkaya berbagai ilmu pengetahuan. Perpustakaan yang didukung oleh uang publik tersedia untuk semua anggota masyarakat, tanpa diskriminasi, Yusuf (1996)

Menurut Rachman (2009), perpustakaan umum harus terbuka untuk umum sehingga orang dapat menggunakan sumber daya perpustakaan untuk memperbaiki diri secara intelektual, profesional, dan sosial. Sebagai bonus tambahan, perpustakaan adalah sumber data yang cepat, sederhana, dan benar yang dapat diandalkan tentang semua aspek kehidupan pribadi dan masyarakat. Perpustakaan juga berkontribusi pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dengan menyediakan informasi dan bahan pustaka.

Peran ganda perpustakaan umum sebagai pusat informasi dan ruang belajar masyarakat bukannya tanpa tantangan. Menurut Prasetyawan et al (2018), lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengembangkan dan membangun layanan sosial yang menggerakkan orang secara mendalam. Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga, yang merupakan bagian dari Perpustakaan Umum Inggris, menyimpan rahasia keberhasilan perpustakaan dalam merebut hati para konstituennya. Perpustakaan sangat penting karena dapat menjadi tempat yang tenang dan damai

untuk belajar, salah satu upaya dari beberapa perpustakaan adalah dengan diterapkannya Standar Perpustakaan. Standar dikatakan sebagai suatu ukuran yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman dalam menilai sesuatu yang baik dan kurang baik. Dengan adanya standar, suatu kegiatan diikuti dengan aturan yang ditetapkan dan memiliki pedoman yang jelas.

Upaya ini tidak dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan jika tidak ada standar yang jelas. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini, Standar Nasional Perpustakaan berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai perpustakaan dan menetapkan kebijakan, penanganan koleksi, pengembangan layanan, kepegawaian, dan sarana dan prasarana.

Pandangan Sudijoyo dalam Akbar (2014), evaluasi adalah berpikir kritis mengenai keberhasilan dan kegagalan program pengembangan diri. Jika benar bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan suatu lembaga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai lembaga tersebut, maka demikian juga halnya dengan penelitian dan lembaga lain yang beroperasi di bawah payung lembaga tersebut. Tujuan dan manfaatnya di sini adalah untuk lebih melayani kebutuhan informasi publik dan pengunjung perpustakaan dengan memberikan layanan yang lebih berkualitas yang memenuhi persyaratan Sistem Layanan Perpustakaan Nasional. Mengevaluasi perpustakaan harus dikaitkan dengan masyarakat yang dilayaninya. Selain itu, banyak sasaran evaluasi seperti, masukan, proses, keluaran dan perubahan sosial sebagai

eksistensi perpustakaan. Oleh karena itu, evaluasi perpustakaan terhadap kemajuan perpustakaan perlu dilakukan. Sementara itu, khususnya Dispusip sejalan dengan visi dan misi kelembagaan. Peranan perpustakaan sangat penting untuk peningkatan pelayanan perpustakaan yang sangat perlu diperhatikan oleh pustakawan, dengan melayani pemustaka dan menerapkan sikap yang baik dan lemah lembut sebab, pelayanan perpustakaan yang baik berarti meningkatkan jumlah pengunjung dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan.

Perpustakaan Umum Kota Surabaya mulai berdiri sejak tahun 1984 dasar hukum berdirinya adalah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 605 tahun 1984. Perlu diketahui bahwa sebelum Perpustakaan Umum lahir terlebih dahulu didirikan Badan Pembina Perpustakaan Kotamadya Daerah Tk II Surabaya dengan surat keputusan Walikotamadya Surabaya No.31 tahun 1981. Kemudian statusnya diubah menjadi Unit Pelaksana Daerah (UPD) sejak tahun 1995 dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya Nomor II Tahun 1995. Sejak terbitnya Perda Nomor 1 / 1995 Perpustakaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya mempunyai status Kantor (Eselon III) dipimpin oleh 1 orang Kasubbag TU (Eselon IV A) dan 3 orang Kasi (Eselon IV A) yang meliputi Kasi Layanan dan Informasi, Kasi Pembinaan, dan Kasi Pengadaan dan Pengolahan.

Pada tahun 2001 dengan adanya otonomi daerah, Perpustakaan umum berubah statusnya menjadi Kantor Perpustakaan Umum Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Koa Surabaya dan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 tahun 2001 tentang rincian tugas dan

fungsi Kantor Perpustakaan Umum Surabaya. Pada Tahun 2005 Kantor Perpustakaan merger dengan Kantor Arsip dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 74 tahun 2005 menjadi Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya dan status lembaganya menjadi Badan (Eselon II b) sedangkan Struktur Organisasinya Barpus dipimpin 1 (satu) orang Kepala (Eselon IIb).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya atau biasa disingkat Dispusip memiliki 2 perpustakaan umum dan 2 badan kearsipan. Keberadaan Dispusip khususnya Perpustakaan Umum yang berlokasi di Jl. Rungkut Asri Tengah No. 5-7, cukup strategis karena berada di Surabaya Timur. Terletak di pemukiman warga serta berdekatan dengan sekolah, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Untuk fasilitasnya yang cukup mendukung meliputi ruangan yang ber-AC, kipas angin, meja dan kursi serta fasilitas wifi yang dapat digunakan serta suasana yang nyaman, tenang dan tidak terlalu bising oleh kendaraan bermotor membuat pengunjung cukup betah berada di tempat tersebut dalam waktu yang cukup lama. Namun, berdasarkan observasi awal penulis di lokasi yang melakukan wawancara dengan pengunjung perpustakaan bahwa, rata-rata yang mengunjungi di perpustakaan kota berlokasi di Jl. Rungkut Asri Tengah No. 5-7 adalah siswa maupun siswi yang menunggu jemputan se usai pulang sekolah. Ini merupakan fungsi dari perpustakaan tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan , Perpustakaan pengawas, perpustakaan cadangan, perpustakaan studi, perpustakaan referensi, dan

perpustakaan pelestarian adalah semua layanan yang disediakan oleh perpustakaan daerah. Kepemilikan, fasilitas, layanan, personel, struktur, dan administrasi perpustakaan umum semuanya diatur dalam pedoman nasional untuk perpustakaan umum di tingkat kabupaten dan kota. Mereka yang bertanggung jawab atas perpustakaan kota atau kabupaten harus mengikuti pedoman ini. Standar Nasional Perpustakaan atau biasa disingkat SNP tersebut memiliki enam kriteria yaitu, (1) standar koleksi perpustakaan, (2) standar sarana dan prasarana perpustakaan, (3) standar pelayanan perpustakaan, (4) standar tenaga perpustakaan, (5) standar penyelenggaraan perpustakaan, dan (6) standar pengelolaan perpustakaan.

Pertama, standar koleksi perpustakaan. Efisiensi dalam pengelolaan koleksi perpustakaan sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perpustakaan yang koleksinya lengkap serta disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka memungkinkan pemustaka untuk menemukan jenis-jenis informasi dan pengetahuan yang mereka butuhkan, selain itu koleksi yang memiliki kualitas dan terkini, dapat menghadirkan kepuasan untuk pemustaka, sebab informasi yang dikandungnya adalah informasi yang bermanfaat, berkualitas dan *up-to-date*.

Tabel 1.1 Jumlah Koleksi Judul Buku

Indikator	2021	2022	2023
Jumlah koleksi judul buku	474.479	537.301	507.234

Sumber: Satu Data, dispusip.surabaya.go.id

Berdasarkan tabel diatas, perpustakaan memiliki jumlah keseluruhan koleksi 507.234, hal ini sudah melebihi dari ketentuan SNP, yang mana jumlah judul koleksi dengan tipe penduduk kota Surabaya sekitar 3juta penduduk maka jumlah judul tipe A minimum 75.000 judul. Tetapi, perpustakaan tidak memiliki koleksi digital seperti jurnal. Hal ini sesuai dengan wawancara awal penulis dengan staf pengelola perpustakaan :

”Ada banyak macam jenis koleksi disini, meliputi karya tulis seperti manuskrip, karya cetak seperti majalah, koran, lalu karya rekam seperti cd/dvd rekaman audio maupun video. Lalu ada, buku mata pelajaran, buku sesuai bidang profesi pekerjaan. Namun, disini masih belum ada koleksi langka seperti tulisan yang di daun lontar, memang seharusnya ada. Dan juga kalo kamu cari di website nya, kamu tidak akan menemukan jurnal. Dan kita fokusnya hanya di buku”

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, perpustakaan memiliki semua jenis koleksi, tetapi perpustakaan masih belum memiliki koleksi digital seperti koleksi jurnal.

Fungsi perpustakaan sebagai sumber daya bagi pemustakanya, menyediakan pilihan yang komprehensif dan terpelihara dengan baik sangat penting untuk menjaga kebahagiaan mereka. Pelanggan perpustakaan dapat belajar tentang topik dan tren baru

dengan membaca dengan teliti berita dan buku terbaru yang dirilis secara berkala, dan mereka dapat memperoleh wawasan tentang peristiwa bersejarah dan penemuan ilmiah dengan membaca pilihan buku perpustakaan yang ekstensif. mata pelajaran yang berkaitan dengan masyarakat, ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Hal ini disebabkan kualitas kemampuan perpustakaan dalam melayani kebutuhan informasi pemustakanya bergantung pada bahan yang ditampungnya. Oleh karena itu, perpustakaan harus terus-menerus berupaya untuk pengembangan koleksi secara kuantitas dan dari segi kepuasan serta kualitas.

Kedua, standar sarana dan prasarana perpustakaan, berdasarkan observasi awal penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan. Untuk perpustakaan ibu kota kedua di Indonesia, sudah seharusnya diimbangi oleh teknologi yang canggih serta memastikan bahwa semua warga mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap teknologi tersebut namun, perpustakaan runkut tidak memiliki komputer untuk akses internet. Jika dilihat ketentuan SNP bahwa “Peralatan Multimedia minimum terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi”. Perpustakaan Rungkut hanya memiliki komputer dengan akses untuk mengisi buku tamu serta komputer untuk pencarian bahan koleksi. Berbeda dengan Perpustakaan di Balai Kota, perpustakaan tersebut menyediakan beberapa komputer untuk akses internet, hal ini dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana belum didistribusikan secara merata.

Ketiga, standar pelayanan perpustakaan, perpustakaan tidak hanya dengan jumlah koleksi yang banyak serta berkualitas, namun perpustakaan harus mampu

menarik perhatian warga pemustaka untuk mengunjungi serta menikmati koleksi serta fasilitas perpustakaan.

Tabel 1.2 Banyaknya Peminjaman Buku

URAIAN	2021	2022	2023
Banyaknya buku yang dipinjam menurut golongan	1.752	1.533	1.832

Sumber : Satu Data, dispusip.surabaya.go.id

Berdasarkan satu data dalam web dispusip.surabaya.go.id, menjelaskan bahwa data mengenai banyaknya peminjaman buku perpustakaan menurut golongan mulai dari 3 tahun terakhir. Banyaknya buku yang dipinjam mengalami fluktuatif di 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, banyaknya peminjaman buku yaitu 1.752 koleksi. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 87% dengan jumlah 1.533 koleksi yang dipinjam. Selanjutnya pada tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 83% dengan jumlah 1.832 koleksi yang dipinjam. Selain itu, dilihat dari berita online

Berdasarkan berita online jawapos.com, dapat diketahui bahwa :
 “Kenaikan jumlah pengunjung tak hanya terjadi di Perpustakaan Balai Pemuda. Kenaikan juga terlihat di Perpustakaan Kota Surabaya di Jalan Rungkut. Pengunjung perpustakaan dengan 58 ribu koleksi buku tersebut didominasi pelajar. Koordinator Perpustakaan Sugeng Hariyanto mengatakan, saat ini jumlah pengunjung Perpustakaan Rungkut merangkak naik. ”Bisa sampai 70 pengunjung tiap harinya,” tuturmya. Dia berharap jumlah pengunjung semakin meningkat. ”Target awal seperti sebelum pandemi. Ratusan orang lah,” lanjutnya.” (Sholahudin, 2022)

Tetapi, berdasarkan observasi awal penulis secara langsung dilokasi, melalui daftar pengisian buku pengunjung, diketahui bahwa pengunjung perpustakaan kota

khususnya di Jl. Rungkut Asri No. 5-7 tidak mencapai 70 pengunjung. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketidaksesuaian antara yang ada diberita online dengan kenyataan yang ada dilapangan.



Gambar 1.2 Ulasan Google Dispusip Rungkut
 Sumber : Ulasan dari *google* Perpustakaan Rungkut

Selain itu, berdasarkan ulasan google tersebut, salah satu pengunjung membahas permasalahan kinerja para staf. Asumsi awal bahwa, dikarenakan layanan perpustakaan ini bersama dengan kantor Dispusip sehingga masih memiliki kelemahan yaitu kinerja para staf perpustakaan yang belum maksimal, seperti terdapat oknum petugas yang kurang ramah kepada pengunjung dan saat jam istirahat petugas membuat kegaduhan atau berisik sehingga mengganggu pengunjung yang ada didalam perpustakaan, hingga petugas perpustakaan yang menggunakan sandal saat melayani pengunjung. Maka dari itu, implementasi staf tersebut tidak selaras dengan SNP , karena dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pada perpustakaan kota, sehingga yang akan berakibat pada menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan.

Pertimbangan Kawet (2015) tentang peningkatan kualitas dan kelengkapan koleksi merupakan 2 (dua) prinsip pengembangan koleksi dibanding yang lain. Artinya relevansi pembaruan dan personalisasi (terhadap minat dan kebutuhan pengguna). Prinsip ini harus diterapkan untuk semua jenis perpustakaan. Selain usaha untuk menciptakan kepuasan dan memberikan koleksi secara relevan sesuai misi lembaga, juga memberikan kepuasan kepada pengguna aktif atas kualitas serta kelengkapan koleksi. berlandaskan deskripsi ini, koleksi yang tersedia perlu dihitung secara seksama sisa bahan pustaka/koleksi sesudah melakukan transaksi sepanjang tahun.

Keempat, mengenai standar tenaga perpustakaan. Perpustakaan dapat dikatakan efektif apabila ditunjang dengan tenaga kerja yang berkualitas sehingga akan menghasilkan layanan yang optimal yang sesuai dengan tujuan daripada perpustakaan itu sendiri. Pustakawan menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan minat baca serta kunjungan perpustakaan. SNP menegaskan bahwa dari segi sumber daya manusia/tenaga perpustakaan umum, total pekerja perpustakaan (pustakawan) yang mempunyai kualifikasi dalam bagian perpustakaan dan informasi minimal satu orang bagi tiap 75.000 penduduk . Dengan jumlah penduduk kota Surabaya yang berada di angka 3 juta jiwa, jika sesuai dengan SNP maka total pustakawan yang mempunyai kualifikasi yakni $2.874.000 : 75.000 = 39$ pustakawan. Namun kenyataan di lapangan pustakawan di Dispusip kota Surabaya berjumlah 7 pustakawan.

Kelima, standar penyelenggara perpustakaan. Administrasi yang baik dan benar, berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, harus dilaksanakan oleh perpustakaan daerah untuk mencapai tujuan tersebut. George R. Terry, dalam buku Sutarno (2006),

menjelaskan bahwa tanggung jawab manajemen mencakup penetapan standar, pengalokasian sumber daya, penerapan perubahan, dan pemantauan kinerja. Pedoman ini sangat penting untuk menerapkan manajemen yang efektif yang mengikuti strategi dan menghasilkan hasil yang diinginkan.

Keenam, standar pengelola perpustakaan. keberadaan perpustakaan kota tidak hanya dijadikan sebagai simbol pendidikan di masyarakat atau sebagai tempat menyimpan tumpukan buku. Hal ini menimbulkan persepsi menurut Hidayatullah (2019) bahwa pengelolaan perpustakaan itu tidak memerlukan suatu acuan atau standar serta tidak melibatkan pustakawan dalam manajemennya. Sedangkan proses pengelolaan manajemen di perpustakaan sama kompleksnya dengan proses pengelolaan di bidang lain, dan diyakini bahwa perpustakaan perlu ditata oleh berbagai individu yang pakar dalam bidang mereka dan suatu faktor krusial untuk menggapai tujuan industri yakni loyalitas dan kemampuan untuk mengelola perpustakaan.

Dapat dilihat dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan kota :

Berdasarkan berita online jawapos.com,
 “Bukan hanya itu, Perpustakaan Rungkut juga mempunyai program wisata buku. Bekerja sama dengan sekolah untuk mengajak murid berkunjung serta membaca. ”Bisa daring melalui Zoom atau berkunjung langsung,” ujarnya. Sugeng menjelaskan, bagi warga yang ingin meminjam buku, syaratnya cukup mudah, yaitu memiliki kartu tanda anggota. ”Bagi warga luar kota memberikan jaminan Rp 100.000,” ujarnya. Selain wisata buku, strategi yang digunakan untuk mendongkrak jumlah pengunjung dan tingkat literasi adalah dengan bus buku. ”Ada bus yang keliling ke sekolah-sekolah,” jelasnya. Sugeng mengatakan, pengunjung tidak perlu khawatir akan kenyamanan di perpustakaan kota. Sebab, perpustakaan memiliki ruang terpisah untuk anak-anak dan dewasa. ”Biar semuanya betah,” pungkasnya. (Sholahudin, 2022)

SNP sudah lebih dari sepuluh tahun diterbitkan, sudah banyak juga penelitian yang dilakukan, tetapi sampai saat ini belum adanya upaya untuk mengevaluasi terhadap capaian atas standar perpustakaan di tingkat kabupaten\kota. Dokumen ini sementara hanya menjadi dokumen *de jure*, yang artinya dokumen ini hanya berdasarkan hukum yang semestinya ada. Jadi, penelitian ini berusaha mengisi celah penelitian yang belum ada sebelumnya, dan peneliti cenderung melihat evaluasi mengenai ke enam sasaran kajian SNP.

Berdasarkan penjelasan diatas, sudah semestinya perustakaan umum kota mengimplementasikan pedoman mengenai SNP dalam menggapai tujuan yang dicanangkan pada visi dan misi serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan persyaratan yang digariskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menyerukan penyeragaman praktik penyelenggaraan perpustakaan. Sejak Perpustakaan Nasional menerbitkan SNP pada 2011, perpustakaan kota harus mengikutinya. Maka, peneliti tertarik untuk mengukur seberapa baik SNP telah dipraktikkan, khususnya yang berkaitan dengan standar koleksi, standar layanan, sarana dan prasarana, standar tenaga, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan perpustakaan. Penting untuk menilai apakah tujuan dan tugas perpustakaan telah tercapai atau belum, dan apakah standarnya telah meningkat atau belum. Maka, penulis ingin menjadikannya sebagai topik penelitian dengan judul **“Evaluasi Capaian Standar Nasional Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada perihal yang melatarbelakangi dan sudah dipaparkan tersebut, sehingga masalah yang ingin diutarakan yakni mengenai bagaimana evaluasi capaian Standar Nasional Perpustakaan di Perpustakaan Kota Surabaya, yang terletak di Jl. Rungkut Asri Tengah No.5-7.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perihal yang menjadi permasalahan itu, sehingga tujuan yang ingin dicapai pada riset ini ialah: Untuk mengetahui, mengevaluasi capaian Standar Nasional Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai konsep evaluasi dan kebijakan evaluasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kajian evaluasi dalam pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan.

b) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Studi ini dapat digunakan sebagai landasan untuk karya akademik masa depan di bidang ini, serta tambahan yang berguna untuk bagian referensi perpustakaan sekolah.

c) Bagi Pemerintah/Instansi/Dinas Organisasi/Pihak lainnya

Penulis bermaksud agar penelitian ini dapat menjadi sarana penilaian dan sumber saran bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya tentang kesesuaian Standar Perpustakaan Nasional berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 mengenai Standar Nasional Perpustakaan.